

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Daerah perbatasan merupakan pintu gerbang Indonesia dan seharusnya dapat memberikan citra yang lebih baik. Namun, pemandangan di perbatasan Indonesia tidak sebagus negara tetangga dengan mempunyai sarana dan prasarana yang jauh lebih memadai. Selain itu, wilayah perbatasan antar negara juga memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tertinggal melalui perdagangan lintas batas. Hal ini memberikan peluang untuk peningkatan produksi lebih lanjut dan menciptakan berbagai efek pengganda (*multiplier effects*).¹

Kerjasama yang baik merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan ekonomi di kawasan perbatasan. Rancangan kerjasama dapat fokus pada penghapusan isolasi perbatasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Salah satu kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia - Malaysia adalah Forum Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia

¹ Mukti, Sri Handoyo. 2001. "Konsep Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan-Indo Malay *Techno Agropolitan* (IMTAC)". Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi

(Sosek Malindo). Tujuan dari perjanjian kerjasama Sosek Malindo adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri telah menjadi pelopor kerjasama antara Sosek Malindo dan sejak tahun 1985. Seiring berkembangnya kerjasama ini, berbagai program pembangunan kawasan perbatasan telah muncul melalui perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Mulai dari membangun pos lintas batas hingga pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan.

Sifat hubungan kerjasama berubah dari kompetisi, menang dan kalah, didominasi penakluk menjadi saling menguntungkan, saling berubah menjadi saling menguntungkan dan kemitraan.² Selain itu, tujuan utama kemitraan adalah untuk pengembangan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan, berdasarkan struktur ekonomi yang kuat dan kesetaraan dengan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya jalinan kerjasama dan kemitraan antar negara diharapkan dapat memungkinkan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan.³

Sosek Malindo adalah organisasi bilateral yang didirikan antara Indonesia dan Malaysia di bidang pembangunan sosial ekonomi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1985. Tujuan dibentuknya organisasi ini antara lain untuk dapat memperhatikan peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal

² Angga, Dede. 2006. Asean Secretariat, 1997, "Asean Economic Co-operation : Transition & transformation". *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Singapore.*

³ Bobo, Julius. 2003. "Transformasi Ekonomi Rakyat". PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta. Hal. 182

di daerah perbatasan. Seperti kita ketahui, masyarakat yang tinggal di sekitar perbatasan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk hidup layak. Tujuan utama dari Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (KK Sosek Malindo) adalah untuk mendiskusikan proyek bersama di daerah perbatasan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang tinggal di perbatasan Indonesia dan Malaysia.⁴

Banyak permasalahan yang muncul di daerah perbatasan, seperti kurangnya perhatian pemerintah untuk dapat memperbaiki keadaan di daerah perbatasan. Presiden Joko Widodo akan melaksanakan pembangunan perbatasan Indonesia mulai dari Entikong, Kalimantan Barat. Secara khusus, *dry port* dan fasilitas pendukung lainnya akan dibangun di kawasan ini. Dengan adanya pembangunan dari *dry port* tersebut, maka akan memudahkan kegiatan ekspor-impor, tak hanya itu jalan juga akan diperbesar. Pengembangan kawasan perbatasan ini merupakan proyek besar untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi perbatasannya, terutama jalan nasionalnya.

Pembangunan kawasan perbatasan ini telah ditargetkan sejak tahun 2015 dengan target waktu yakni satu tahun pengerjaan, tetapi jika dalam pengerjaannya tidak selesai, maka dana anggaran akan tetap ada di tahun 2016. Masyarakat sekitar tentu saja sangat mengharapkan realisasi dari pembangunan kawasan di sekitar perbatasan tersebut, hal ini dikarenakan

⁴ Nugrahaningsih -, Nurfitri (2015-08-02). "Kerjasama Bilateral Indonesia–Malaysia: Studi Tentang Sosek Malindo Dalam Pembangunanpos Pemeriksaan Lintas Batas Di Jagoi Babangkabupaten Bengkayang – Kalimantan Barat". *Sosiohumaniora*. 17 (2): 149–154.

mereka akan merasakan keuntungan ditandai dengan adanya akses kegiatan ekspor impor yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan perbatasan tersebut meningkat.

Ini adalah masalah signifikan bahwa obat-obatan terlarang dan narkotika diselundupkan ke Indonesia. Dengan tujuan memperoleh keuntungan yang signifikan dengan menyelundupkan narkoba ke banyak negara, penyebaran narkotika berkembang pesat, bukan untuk tujuan medis atau ilmiah melainkan untuk keuntungan pribadi.⁵ Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sebuah undang-undang baru dibuat oleh pemerintah pada tahun 2009, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pembentukan Badan Narkotika Nasional, sebagai tanggapan atas meningkatnya peredaran narkoba di hampir semua lapisan masyarakat.⁶ Tujuan Badan Narkotika Nasional dalam menangani narkoba adalah “mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan tindak pidana peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (narkoba) lainnya pada tahun 2015”.

⁵ Kusno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, Malang, UMM Press, hlm 3

⁶ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU35-2009Narkotika.pdf>

Organisasi serupa didirikan di tingkat provinsi, kota/kabupaten, bahkan sebagai tindak lanjut dari tujuan tersebut, dan diharapkan dapat mendukung operasi pemberantasan narkoba. Sebuah organisasi yang mewakili BNN di setiap provinsi didirikan untuk menghentikan penyebaran dan penyelundupan narkoba ke setiap daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba, yang meliputi visi BNN, dukungan dari kepolisian setempat dan Polri, international security linking. Kerjasama keamanan antar negara, dan peran masyarakat hadir di Indonesia. Karena merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalbar menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran penyelundupan narkoba. Banyaknya kasus penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh warga negara asing menjadi buktinya (orang asing).

Di Kalimantan Barat, peredaran narkoba berkembang pesat. Ada beberapa alasan mengapa orang asing (orang asing) menyelundupkan narkoba ke Indonesia, antara lain karena harga narkoba di sana relatif mahal, sehingga menguntungkan para pengedarnya karena berbagai alasan. pengedar narkoba dari luar negeri untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia karena negara tujuan dan sifat konsumtif orang Indonesia. Karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan Malaysia, pulau Kalimantan di Indonesia merupakan kandidat utama untuk dimanfaatkan sebagai pusat transit barang-barang ilegal tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) yang memiliki tanggung jawab dan fungsi yang sama dengan Badan Narkotika Nasional, dibentuk oleh pemerintah (BNN). Dalam

rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap obat-obatan terlarang, Pemerintah Kalimantan telah mengembangkan organisasi vertikal di bawah arahan Badan Narkotika Nasional (P4GN). Berdasarkan informasi dari BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi, program kegiatan menekankan operasionalisasi satuan tugas (Satgas) (BNNP), dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diharapkan dapat meningkatkan perannya di sektor P4GN. Visinya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁷

Perbatasan Entikong di Kalimantan Barat menjadi pintu masuk penyelundupan narkoba. Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, terdapat sebuah kecamatan bernama Entikong. Jalur darat yang sering disebut sebagai jalur yang dapat dilalui langsung oleh kendaraan darat dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyeberangi sungai atau laut, menarik banyak pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang dari Malaysia. Entikong memiliki perbatasan darat dengan Malaysia Timur, khususnya Sarawak. Melalui penyeberangan perbatasan di Entikong. Setiap tahun, semakin banyak narkoba ilegal yang diangkut melalui Entikong. Sebanyak 28.240 gram sabu dan 21.727 butir ekstasi disita dari dua kasus melalui jalur tikus pada tahun 2018, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea dan Cukai

⁷ Kadarmanita A, 2010, Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, PN PT. Forum Media Utama, Jakarta

perbatasan Entikong. Petugas menggagalkan transaksi narkoba jenis sabu 21,24 kg.



Sumber: (Kompas.com/RobertusBelarminus)

Empat tersangka kasus penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, Alasan yang digunakan adalah berpura-pura berjalan kaki melintasi pos batas menuju jalur tikus, kemudian setelah berhasil melewati jalur tikus narkoba tersebut dibawa menggunakan sepeda motor. Peredaran gelap narkoba ke Indonesia melalui jalur tikus sangatlah masif pergerakannya.⁸

2. Rumusan Masalah

Dari penjabaran yang sudah dituangkan pada bagian latar belakang. Penulis memfokuskan penelitian terhadap bagaimana hubungan bilateral dari Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan daerah perbatasan Kalimantan Barat. Daerah perbatasan Indonesia belum mempunyai sarana dan prasarana sebaik Malaysia. Selain itu, wilayah perbatasan antar negara juga memiliki posisi strategis sebagai

⁸ Robertus Belarminus, 2018, Kronologi Penyelundupan Narkoba dari Malaysia Yang Dikendalikan Napi, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/06/12482241/kronologi-penyelundupan-narkoba-dari-malaysia-yang-dikendalikan-napi>, diakses pada tanggal 12 September 2022

pusat pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal. Di daerah perbatasan Entikong dan Sarawak juga sangat rawan akan kejahatan ilegal khususnya peredaran narkoba. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dalam pengembangan kawasan perbatasan. Masalah penyelundupan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang serius. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran terbesar penyelundupan narkoba yaitu di Kalimantan Barat karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara asing (WNA). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dalam penelitian ini: **“Bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba di perbatasan Entikong - Sarawak?”**

3. Tujuan Penelitian

Melalui latar Belakang yang telah dijelaskan diatas, Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai hasil yang diharapkan oleh peneliti yaitu :

1. Mengetahui kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia.
2. Kebijakan pembangunan terhadap wilayah perbatasan.
3. Mengaplikasikan teori dan konsep dalam studi ilmu Hubungan Internasional sebagai alat analisis terhadap pertanyaan penelitian di skripsi ini.

4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap karya ilmu perpustakaan di bidang studi Hubungan Internasional.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan penelitian selanjutnya untuk menjadi acuan bagi adik tingkat pada bidang studi hubungan internasional.

5. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa bab yang menjelaskan setiap bagian yang diperlukan dalam penelitian. Setiap bagian tersebut mempunyai perannya masing-masing dalam menjelaskan bagian yang dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) tahapan.

Dimana pada Bab Pertama terdiri atas pendahuluan untuk menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini yang berisikan tentang bagaimana Indonesia dan Malaysia bisa melakukan hubungan bilateral dengan melihat perbatasan dan peredaran narkoba di perbatasan kedua negara.

Pada Bab Kedua, terdiri dari kajian pustaka, yang mana berisikan tentang berbagai sumber penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan bagi penulis sebagai rujukan untuk melakukan penelitian ini. Berbagai hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan penulis untuk menambah informasi serta memberikan

gambaran mengenai teori dan konsep yang juga relevan dengan pembahasan yang diangkat dalam bab ini dan juga nantinya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis masalah yang diangkat. Dan juga berisi kerangka pemikiran.

Pada Bab Ketiga berisi mengenai penggunaan metode serta jenis penelitian yang dilakukan. Di dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana sistematika penulisan melalui pendekatan penggunaan metode penelitian, tekni pengumpulan data dan cara pengelolaan atau analisis data.

Pada Bab Keempat berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan melalui beberapa bahan rujukan sebelumnya, sehingga penulis berusaha untuk menjelaskan dengan menggunakan analisis yang dikaitkan dengan teori dan juga konsep yang penulis gunakan. Pada bab ini, penulis memaparkan data sebelumnya dan kemudian melakukan analisis dengan beberapa sumber aspek yang dinilai relevan dengan teori serta konsep yang digunakan tersebut.

Selanjutnya pada Bab Kelima, yakni bagian penutup. Dimana penulis memberikan kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil akhir yang sudah penulis kerjakan sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran untuk para pembaca agar dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk memperbaiki kesalahan penulis dalam menyusun skripsi ini.